

Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan hasil Rapat antara Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas) dan Bank dalam rapat-rapat di siklus pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019, *Pemerintah mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8% Perkembangan terakhir, Panja Asumsi menetapkan asumsi pertumbuhan berkisar 5,2%-5,6%*. Dasar pengajuan asumsi tersebut dilandasi optimisme bahwa akan terjadi peningkatan investasi dan momentum perekonomian yang semakin membaik. Apabila dilihat sekilas dari proyeksi tersebut, hal tersebut sangat jauh dari apa yang ditargetkan oleh Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 8% pada tahun 2019. Bahkan asumsi atau proyeksi tersebut sebenarnya juga kurang realistis apabila melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi belakangan ini.

Ketidakrealistisan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut dipertegas dengan selalu melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR RI selama tiga tahun berturut-turut. Perkembangan terakhir pada TA 2017 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07% dibawah target APBNP 2017 sebesar 5,2% (BPS, 2017). Namun, pencapaian 5,07% ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2014. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari kinerja ekspor Indonesia sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, yang belum mencapai harapan dikarenakan ada perlambatan ekonomi global yang menurunkan *demand* ekspor khususnya non migas. Penurunan ini secara eksternal disebabkan oleh kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang berdampak sistemik secara *indirect* pada kinerja ekspor Indonesia. Sementara secara internal berkaitan dengan belum kompetitifnya sarana prasarana penunjang ekspor. Alhasil, pemerintah mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019 mengusung tema kebijakan fiskal 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Terkait dengan investasi, apabila dilihat dari perilaku investor, mereka cenderung untuk *wait and see* pada tahun 2019 yang bertepatan dengan pilpres dan pileg. Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan timbulnya ketidakpastian karena kemungkinan perubahan regulasi. Untuk daya saing, pemerintah berencana untuk memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan ekspor. Disatu sisi beberapa analisa dari lembaga riset dan perbankan menyakini bahwa kinerja ekspor di tahun politik ini akan melambat. Berbagai persoalan fundamental seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi menjadi faktor penghambat kinerja ekspor.

Pada tahun politik seperti ini akan lebih baik bagi pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan dengan memprioritaskan peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Khusus belanja pemerintah, pemerintah perlu fokus pada peningkatan Belanja Modal yang diarahkan untuk produktivitas dan konektivitas serta menyerap tenaga kerja terutama di daerah.

Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah dapat menggunakan kebijakan populis seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Tunjangan Hari Raya (THR). Tentunya penyaluran Bansos tersebut harus tepat sasaran dan untuk itulah perlu dirintis sistem *database* yang terintegrasi antar instansi dari tingkat pusat hingga ke daerah atau desa. Kebijakan seperti ini memberikan manfaat untuk jangka pendek dan dampaknya hanya terasa pada tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal khususnya yang bersifat produktif dan mempunyai dalam pembangunan seperti jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan dan bandara meskipun manfaatnya baru bisa dirasakan pada beberapa tahun yang akan datang. Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa bahwa hingga akhir 2017, pemerintah telah merampungkan 26 Proyek Nasional Strategis (PSN) infrastruktur dengan total nilai investasi Rp46,5 triliun atau 10% dari total PSN sebanyak 245 proyek dan 2 program. Sebanyak 20 proyek diselesaikan pada 2016, sedangkan pada tahun lalu, ada 6 proyek yang telah dioperasikan. Estimasi total nilai investasi seluruh proyek dan program PSN Rp4.197 triliun.

Dari aspek kebijakan moneter, Pemerintah bersama BI mengajukan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada tahun 2019 berkisar antara Rp13.700-Rp14.000. Pada APBN 2018, pemerintah bersama DPR mematok nilai tukar rupiah sebesar Rp13.400 dengan pertumbuhan sebesar 5,4%. Sedangkan pada tahun 2019, asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar cenderung lebih melemah namun pemerintah tetap menginginkan pertumbuhan yang sama bahkan lebih tinggi. Dalam skenario seperti ini, pemerintah harus mewaspadai dampak defisit neraca perdagangan dengan terus menggenjot ekspor dan membatasi impor agar target pertumbuhan dapat tercapai. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan mencapai US\$ 1 miliar. Pemerintah juga perlu memaksimalkan ekspor komoditas kelapa sawit (CPO) disamping minyak dan gas ke negara-negara mitra dagang utama seperti China, Australia, Malaysia hingga AS. Disamping neraca perdagangan, beban belanja pembayaran utang luar negeri pada APBN juga akan terdampak. Adanya perubahan nilai kurs yang terjadi akan membuat pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk melunasi pokok dan bunga utang yang sudah jatuh tempo. Hal tersebut bisa saja mengganggu pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah. Sementara dari sektor swasta, dengan adanya pelemahan ini juga akan membebani kondisi finansial mereka sehingga menghambat proses produksi. Dampaknya tentu akan menurunkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat.

Terdapat konsekuensi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Apabila ingin meraih tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jangka pendek, pemerintah dapat menempuh kebijakan yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Tetapi apabila berorientasi pada jangka panjang tentu belanja produktif seperti Belanja Modal adalah jawabannya meskipun hal tersebut berpotensi mengorbankan target pertumbuhan yang disepakati karena manfaatnya baru dirasakan beberapa tahun yang akan datang. Target pertumbuhan sebesar 5,2%-5,6% tidak mustahil tercapai, namun membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang optimal antar K/L dan daerah yang mungkin agak sulit dilakukan pada tahun politik. Berbagai kasus pada pemerintahan sebelumnya menunjukkan sulitnya melakukan koordinasi antara K/L dan daerah terutama pada akhir tahun masa pemerintahan yang berkuasa.